



EVALUASI PENERAPAN KEUNGGULAN APLIKASI MYSAPK BKN DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Su'amah

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Correspondence Email: hasanahkhairuni77@gmail.com

Received: October 12, 2023

Accepted: November 11, 2023

Published: December 31, 2023

Abstract

This research explores the impact of using the My SAPK BKN application on the administrative filing process in the West Lombok Regency Government. Creswell's (2013) theoretical approach and four dimensions of effectiveness measurement are used to understand its influence. The findings from this study show the importance of State Civil Servants having expertise in using applications, checking data carefully, managing data codes efficiently, and understanding data organization and presentation. In addition, factors that support and hinder application implementation are also identified. Evaluation of this application shows that MySAPK BKN has a very vital role for all ASN in West Lombok Regency. Efforts to manage this application aim to improve the skills of every civil servant in using information and communication systems, which is an essential requirement for a civil servant. A qualitative descriptive method was used to evaluate the superiority of the MySAPK BKN application in managing ASN administrative documents in the West Lombok Regency Government.

Keywords: *Evaluation of the implementation of the MY SPAK BKN application, supporting and inhibiting factors in implementing the My SPAK BKN application*

Keywords: *Evaluasi, Aplikasi MySAPK, Administrasi*

A. Pendahuluan

Kemajuan pengetahuan yang meningkat mendorong kemajuan teknologi yang digunakan manusia, memicu perkembangan teknologi yang lebih maju dan mutakhir seperti internet. Penggunaan teknologi komputer pada saat ini semakin meningkat dan semakin meluas, memberikan dukungan bagi para penyelenggara layanan publik untuk membuat keputusan dalam operasional pemerintahan, termasuk dalam aktifitas administratif, pelayanan serta pengelolaan data kepegawaian. E-Government adalah penerapan layanan publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana interaktif antara Pemerintah dengan berbagai pihak, seperti masyarakat umum, dunia bisnis dan lembaga pemerintah lainnya. Awalnya, penerapannya di mulai dengan menyediakan informasi dan data berbasis komputer sebagai bentuk layanan yang sederhana. Dengan hal tersebut, pemerintah di dorong untuk menegaskan perlunya profesionalisme di dalam struktur birokrasi. Birokrasi dianggap sebagai kelompok individu yang bekerja bersama dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten, handal, profesional dan beintergritas, diperlukan seleksi ketat guna mendapatkan PNS yang di anggap mampu dalam menyelenggarakan layanan publik. Tidak hanya menekankan pada kinerja dan pendidikan yang tinggi bagi PNS, tetapi juga mengedepankan kesadaran disiplin guna meningkatkan produktifitas pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Panduan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dijelaskan bahwa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah suatu sistem informasi komputer yang dirancang khussu untuk keperluan pelayanan dalam bidang kepegawaian. Aplikasi SAPK muncul sebagai respon atas kebutuhan BKN akan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelolalan data dan informasi kepegawaian, sehingga dapat memperoleh data pegawai yang

kebih tepat dan akurat, SAPK diharapkan dapat meningkatkan keakratan data PNS yang akan berpengaruh pada prinsip clean government dan good governance. Dapat dinyatakan bahwa SAPK adalah hasil nyata dari penerapan E-Government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang fungsinya terutama dalam proses pelayanan kepegawaian. Pembuatan SAPK bertujuan sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pelayanan kepegawaian, terutama terkait dengan penanganan dan pengolahan data kepegawaian. Menurut Ike Novalia, S. Kom (8 Juni 2022) diperbaharui 11 Januari 2023 dalam sebuah artikel di Finansial.com SAPK mempunyai manfaat antara lain memudahkan ASN dalam menyimpan data dan informasi, memudahkan ASN menyampaikan infromasi data diri atau data pribadi langsung ke database BKN, dapat mengubah data atau informasi dengan cepat dan mudah, dan dapat dengan mudah meperbaharui data dan informasi milik ASN. Sedangkan menurut Sudarmin (2016), tujuan utama dibuatnya SAPK adalah untuk menciptakan data kepegawaian yang up to date di setiap lembaga pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang terhubung secara nasional melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparasi dan objektivitas dalam pelayanan kepegawaian.

Perkembangan dalam pemanfaatan SAPK, bersama dengan hasil penelitian sebelumnya tentang implementasinya, dipastikan akan mengalami evolusi dan perbaikan seiring berjalananya waktu. Awal pengamatan dan hasil wawancara awal menunjukkan bahwa SAPK tidak hanya dimanfaatkan oleh pegawai BKN dan Kantor Regional untuk mengelola berkas masuk dan dokumen kepegawaian, namun juga telah dapat diakses oleh para PNS melalui platform bernama MYSAPK. BKN telah mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebagai realisasi dari penerapan e-government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan. Aplikasi My SAPK BKN ini dapat dijangkau oleh setiap ASN melalui web atau versi android pada laptop atau ponsel mereka

masing-masing. ASN diharapkan untuk secara mandiri memperbarui data mereka kapan pun dan di mana pun, menjadikan informasi pegawai selalu tersedia. Dengan demikian, kami berharap agar ASN di Kabupaten Lombok Barat dapat aktif dalam memperbarui data mereka dengan memulai aktivasi pada aplikasi tersebut.

Dari permasalahan yang telah di sampaikan di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan penelitian yaitu : (1) Bagaimana evaluasi terhadap keunggulan aplikasi My SAPK BKN dalam pengelolaan pemberkasan administrasi ASN di Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, dan (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari aplikasi My SAPK BKN dalam proses pemberkasan administrasi ASN di Kabupaten Lombok Barat?.

Sebagai hasil dari permasalahan ini penulis telah mentepakan judul penelitian menjadi “Evaluasi penerapan keunggulan aplikasi MySAPK BKN dalam pengelolaan dokumen administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat”.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menyelidiki tema tertentu. Untuk memahami dan menjelaskan analisis manfaat aplikasi SAPK BKN Saya dalam kaitannya dengan kearsipan administrasi atau pemberkasan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan observasi, wawancara dan hasil dokumentasi Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yang ditinjau oleh rekan sejawat dan diwawancarai di tempat penelitian yaitu kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia kabupaten Lombok Barat (BKPSDM) dan sumber sekunder yang memberikan informasi dari penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah menganalisis manfaat aplikasi My SAPK BKN Implementasi administrasi di Kabupaten Lombok Barat serta faktor preventif dan pendukungnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

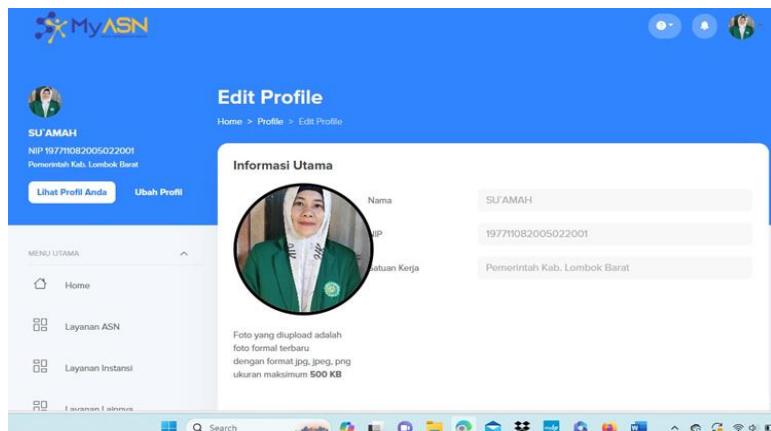
- 1) Evaluasi tentang kelebihan dari aplikas MY SAPK BKN dalam proses pengarsipan dan pemberkasan administratif di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa jauh sistem tersebut memudahkan penggunanya dan sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi keunggulan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Kabupaten Lombok Barat telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya penelitian sebelumnya yang mengulas analisis aplikasi SAPK di kota tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, SAPK dijelaskan sebagai sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk pelayanan kepegawaian. Adopsi SAPK berasal dari kebutuhan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan data serta informasi kepegawaian guna memperoleh data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat. Diharapkan SAPK dapat memperbaiki akurasi data PNS, yang pada gilirannya akan mendukung prinsip clean government dan good governance. Dengan demikian, SAPK merupakan salah satu bentuk implementasi E-Government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pelayanan kepegawaian.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya yang mayoritas mengulas implementasi SAPK, peneliti tertarik untuk mengkaji keunggulan aplikasi My SAPK dalam manajemen dokumen kepegawaian. Selain itu, dari hasil observasi dan wawancara awal, terdapat beberapa permasalahan terkait SAPK. Aplikasi ini telah diimplementasikan selama lebih dari enam bulan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Probolinggo telah melakukan sosialisasi langsung kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten

Lombok Barat untuk membimbing dan memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi dalam administrasi kepegawaian mereka. BKD Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan sosialisasi tersebut secara langsung karena kondisi pandemi, meskipun efektivitasnya kurang optimal. BKD Kabupaten Lombok Barat berharap bahwa seluruh ASN di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat menguasai penggunaan aplikasi ini. My SAPK BKN menjadi sangat penting bagi seluruh ASN.

Berdasarkan studi sebelumnya yang mayoritas memfokuskan pada implementasi SAPK, penulis tertarik untuk mengeksplorasi analisis keunggulan pengelolaan dokumen kepegawaian melalui aplikasi My SAPK. Selain itu, dari pengamatan awal dan hasil wawancara, terdapat beberapa permasalahan terkait SAPK. Implementasi aplikasi tersebut sudah berjalan selama lebih dari enam bulan, dan BKD Kabupaten Lombok Barat telah melakukan sosialisasi langsung kepada setiap ASN di Kabupaten Lombok Barat untuk membimbing dan memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi dalam pemberkasan administratif mereka. Alasan BKD Kabupaten Lombok Barat melakukan sosialisasi langsung saat itu karena adanya situasi pandemi. Meskipun kurang optimal, BKD Kabupaten Lombok Barat tetap berupaya menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Harapan penuh diletakkan oleh BKD Kabupaten Lombok Barat pada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar dapat menguasai aplikasi ini. Aplikasi My SAPK BKN menjadi sangat penting bagi seluruh ASN di Kabupaten Lombok Barat.

*Gambar 1. Aplikasi My SAPK BKN**Sumber: <https://mysapk.bkn.gho.id>*

Sejak My SAPK BKN diperkenalkan, semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Barat diamanatkan untuk menggunakan aplikasi tersebut guna mempermudah tugas-tugas mereka, terutama dalam hal administrasi. Aplikasi ini memungkinkan penyimpanan data PNS secara aman tanpa risiko kebocoran data. Meskipun perlu pengembangan lebih lanjut, penting untuk terus mensosialisasikan kebutuhan dan manfaat dari aplikasi ini. Salah satu instansi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi ini untuk memastikan kemudahan akses bagi seluruh PNS di sana. Pengelolaan aplikasi ini bertujuan agar setiap PNS menjadi terampil dalam mengoperasikan sistem informasi dan komunikasi, keterampilan yang menjadi syarat esensial bagi seorang PNS. Aplikasi ini juga merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh PNS di Kabupaten Lombok Barat untuk memahami dan menggunakan sistem dalam proses administratif. Keterampilan dalam pemberkasan administrasi menjadi kunci penting dalam kelancaran aktivitas instansi, membantu menyelenggarakan administrasi secara efisien. Karenanya, perlakuan yang baik terhadap proses pemberkasan sangat penting di setiap instansi untuk mencegah kerusakan atau kehilangan dokumen, yang dapat mengakibatkan kehilangan jejak sejarah kegiatan instansi tersebut.

Untuk memahami bagaimana Aplikasi My SAPK BKN mempengaruhi proses pemberkasan administrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, peneliti menggunakan pendekatan teori yang disusun oleh Creswell (2013). Dalam analisis ini, terdapat empat dimensi pengukuran efektivitas yang digunakan, yaitu :

1. Mengikuti teori Cresswell (2013), dalam mengelola dan menyiapkan data pada Aplikasi My SAPK, Aparatur Sipil Negara perlu menguasai langkah-langkah penggunaannya terlebih dahulu. Ini mencakup langkah-langkah seperti mengunduh aplikasi, mendaftar, login dengan username dan password yang valid. Setelah berhasil masuk ke aplikasi My SAPK, mereka dapat mulai memasukkan atau memperbarui data. Sebelum memulai proses input data, persiapan beberapa informasi yang diperlukan juga diperlukan. Beberapa karakteristik data yang dapat dimasukkan ke Aplikasi My SAPK BKN termasuk :

- Data pribadi seperti KTP, Akte kelahiran.
- Data keluarga : KK, Buku Nikah, Kartu identitas anak (hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara yang sudah menikah).
- Data pendidikan : ijazah dari SD hingga pendidikan terakhir, bukti telah mengikuti diklat, pelatihan
- kepegawaian saat menjadi CPNS hingga menjadi PNS, sertifikat (jika memang pernah mendapat mengikuti perlombaan atau tugas penting lainnya)
- Data kepegawaian : SK awal hingga akhir, Taspen, NPWP, kartu pegawai, BPJS dll.

2. Membaca Keseluruhan data: Aparatur Sipil Negara di Kantor BKPSDM Kabupaten Lombok Barat perlu memastikan bahwa seluruh pegawai telah memeriksa data mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi My SAPK BKN untuk mencegah kesalahan saat melakukan input data. Melakukan peninjauan menyeluruh pada data saat menggunakan aplikasi My SAPK BKN akan membantu Aparatur Sipil Negara untuk menghindari kesalahan. Hal ini terlihat dari bagaimana Aparatur Sipil Negara memeriksa dengan cermat ketentuan

sebelum mengakses data melalui aplikasi My SAPK BKN. Pentingnya adalah bahwa semua Aparatur Sipil Negara, terutama di Kabupaten Lombok Barat, harus memiliki akses dan pengetahuan mengenai aplikasi My SAPK. Mereka harus memahami ketentuan dan petunjuk yang terkait dengan aplikasi ini. Tanpa pemahaman tersebut, Aparatur Sipil Negara mungkin akan kesulitan saat menggunakan aplikasi My SAPK. Oleh karena itu, keberadaan perwakilan Aparatur Sipil Negara yang memahami aplikasi ini di setiap kantor menjadi penting untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang baru memulai penggunaan aplikasi My SAPK.

3. Mengkoding Data : Pengodean data pada aplikasi My SAPK BKN telah berhasil dilakukan dengan efektif. Mengingat pentingnya perhatian terhadap aplikasi ini agar terhindar dari kesalahan dalam pengumpulan data, persiapan dan pengecekan dokumen-dokumen menjadi hal yang penting. Dapat disimpulkan bahwa langkah awal sebelum memasukkan dan memproses data ke dalam aplikasi My SAPK adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan setiap Aparatur Sipil Negara. Tahapan ini menjadi krusial dalam proses penginputan data pada aplikasi My SAPK, terkait dengan indikator kunci dalam pengkodean data untuk kemudahan analisis. Namun, meskipun pengodean data ini penting, dalam praktiknya tidak selalu berjalan lancar, terutama saat menggunakan teknologi aplikasi yang bisa membingungkan pengguna. Beberapa Aparatur Sipil Negara mengalami kesulitan saat mengakses aplikasi My SAPK BKN selama jam kerja, menyebabkan tingkat keberhasilan masuk ke dalam aplikasi ini menjadi minim.

4. Mendeskripsikan setting : Ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) mencoba mengakses aplikasi My SAPK melalui ponsel, pengalaman yang diperoleh kurang efektif karena tampilannya kurang terperinci dibandingkan dengan menggunakan komputer atau laptop. Namun, akses ke aplikasi ini tetap memerlukan penggunaan username dan password. Setelah masuk, langkah-langkah selanjutnya dapat dilihat dan diikuti. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dari BKN pusat

terhadap aplikasi My SAPK untuk meningkatkan kualitas akses bagi seluruh ASN di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Meskipun masih banyak yang mengeluhkan kesulitan dalam mengakses aplikasi ini, hal ini harus menjadi bagian dari evaluasi BKN pusat agar dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan ASN dalam administrasi data. Dengan memperhatikan indikator pengaturan, penulis dapat dengan mudah mengidentifikasi permasalahan dari penggunaan aplikasi My SAPK. Salah satu informan menekankan bahwa akses melalui komputer atau laptop lebih efektif karena tampilannya lebih jelas dibandingkan dengan akses melalui ponsel. Dengan demikian, ASN harus memiliki pemahaman yang baik terhadap aplikasi My SAPK untuk mempermudah proses penginputan data.

5. Menyajikan Data : Bentuk penyajian yang ada dalam aplikasi My SAPK BKN memudahkan Aparatur Sipil Negara dalam memasukkan data pribadi mereka dan menjamin penyimpanan data tersebut dengan baik. Semua Aparatur Sipil Negara merasa bahwa aplikasi ini bermanfaat dalam menyimpan data pribadi dan administratif mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyajian dalam aplikasi My SAPK BKN mempermudah Aparatur Sipil Negara saat menginput data pribadi dan memastikan penyimpanannya dengan baik. Keunggulan dari My SAPK BKN tampaknya terletak pada kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pembaruan data administratif tanpa harus ke BKN Pusat, karena BKN Pusat telah menyediakan aplikasi ini untuk diakses oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di Indonesia, disajikan dengan cara yang membantu mereka dalam pekerjaan mereka.

6. Menginterpretasika data: Salah satu kelebihan yang ditemukan oleh pegawai ketika menggunakan aplikasi My SAPK adalah kemampuannya dalam mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Informan menyatakan bahwa keunggulannya terletak pada keterlibatan dengan perkembangan teknologi saat ini, di mana Aparatur Sipil Negara dapat mengaksesnya sendiri dengan batasan menu hingga 10 saja. Hal ini memungkinkan untuk lebih cepat mencari profil pegawai

dan meninjau kompetensi masing-masing pegawai. Oleh karena itu, perlu adanya pembimbingan terkait teknologi untuk mengenalkan penggunaan dan keunggulan dari aplikasi My SAPK BKN agar semua Aparatur Sipil Negara dapat mengikuti perkembangan teknologi ini, khususnya inovasi aplikasi My SAPK BKN yang dapat membantu dalam tugas administratif Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia.

2. Pembahasan

1. Faktor Pendukung dari penerapan keunggulan aplikasi My SAPK BKN dalam pengelolaan dokumen administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi dengan beberapa informan, faktor pendukung Analisis Keunggulan Aplikasi My SAPK BKN terhadap Pemberkasan Administrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengacu pada teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier. Edwards III (2014:61) menyajikan empat indikator dalam implementasi kebijakan publik, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari keempat indikator ini, peneliti mencatat hanya dua indikator yang memiliki keterkaitan dengan analisis faktor pendukung, sementara satu indikator menunjukkan hubungan dengan faktor penghambat dalam analisis keunggulan aplikasi My SAPK BKN, sebagai berikut:

a. Komunikasi : Dalam penerapan aplikasi My SAPK BKN, kehadiran aplikasi ini menjadi sangat penting bagi semua pegawai di Indonesia, terutama di Kabupaten Lombok Barat. Penggunaan aplikasi ini memerlukan komunikasi yang jelas agar dapat dipahami oleh para pegawai. Komunikasi tidak hanya berperan sebagai jembatan interaksi, tetapi juga sangat diperlukan dalam fungsi aplikasi ini. Aplikasi My SAPK BKN berperan sebagai sarana komunikasi bagi pegawai di berbagai daerah agar tetap terhubung dengan pusatnya. Dengan demikian, komunikasi akan membentuk interaksi yang erat antara sesama pegawai di Kantor BKPSDM Kabupaten Lombok Barat.

b. Sumber Daya : Sumber daya ini memiliki pengaruh besar terhadap penggunaan aplikasi My SAPK BKN, namun yang paling

penting adalah aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi elemen kunci untuk mengeksekusi rencana dengan efektif. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, semua teknologi tidak akan berhasil jika tidak ada tim manusia yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikannya. Aplikasi My SAPK BKN ini dibuat untuk kepentingan seluruh pegawai di Indonesia, terutama di Probolinggo. Pegawai merupakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi My SAPK BKN sehingga memungkinkan semua pegawai di seluruh Indonesia untuk mengadopsi teknologi ini. Jumlah pengguna aplikasi My SAPK BKN akan mencerminkan seberapa banyak sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan aplikasi tersebut dan merasakan keuntungannya. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi pengembang aplikasi tersebut.

2. Faktor Penghambat dari penerapan keunggulan aplikasi My SAPK BKN dalam pengelolaan dokumen administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Beberapa halangan dalam menganalisis keunggulan Aplikasi My SAPK BKN terhadap Pemberkasan Administrasi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menurut George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier, Edwards III (2014:61) adalah Struktur Organisasi : Indikator struktur birokrasi juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menghambat analisis implementasi keunggulan aplikasi My SAPK BKN terhadap pemberkasan administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Barat. Perbedaan yang jelas terlihat adalah bahwa dalam prinsipnya, semua pegawai harus mentaati prosedur operasional standar (SOP) untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya di lokasi penelitian, masih ada banyak ASN di kantor BKPSDM Kabupaten Lombok Barat yang belum sepenuhnya menyadari keberadaan aplikasi My SAPK BKN. Akibatnya, sejumlah pegawai enggan menggunakan aplikasi ini karena mengalami kesulitan dalam penggunaannya.

Walaupun aplikasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, namun mungkin karena masih baru, My SAPK BKN masih memiliki beberapa kelemahan seperti sinyal yang tidak selalu memadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam penerapan SOP oleh pegawai ketika menggunakan aplikasi My SAPK BKN. Diperlukan upaya pelatihan kembali agar semua pegawai memahami aplikasi ini, mengingat aplikasi ini sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh pegawai, tanpa terkecuali.

D. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Barat, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak terkait serta masyarakat atas kerjasama dalam mengumpulkan data. Kontribusi mereka telah memungkinkan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian sesuai dengan harapan.

Persembahan

Penelitian ini saya persembahkan kepada kerabat yang telah membantu. Terimakasih juga kepada orang terdekat yang selalu memberikan support dan doa untuk saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ike Novalia (11 Januari 2023) artikel di <https://www.finansialku.com/pentingnya-aplikasi-mysapk-bkn-bagi-para ASN/ 22:35>
- Miles dan Huberman dalam Sugiono. (2012). Memahami Penelitian Kuaitatif. Bandung : ALFABETA
- Mubaroq, H., Watoni, S., & Hasanah, Z. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN WALI KOTA PROBOLINGGO DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI

- LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PROBOLINGGO. Publicio:
Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial, 3(2), 20–31.
- N, Shobah. (2015). Teori Penelitian Kualitatif Menurut Creswell 2013.
Universitas Maulana Malik Ibrahim: Pusat Perpustakaan. Diakses
melalui : http://etheses.uin-malang.ac.id/1642/7/11410013_Bab_3.pdf.
<file:///C:/Users/HP/Downloads/analisis%20implemtasi%20keungguhan%20aplikasi%20My%20SPAK.pdf>